

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, dan Kritik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Badrulzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Bandung: Alumni, 2006).
- Friedman, Jack P. *Dictionary of Business Terms* (New York: Barron's Educational Series Inc, 2007).
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary* (St Paul: West Group, 1999).
- Jono. *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Mulyadi, Kartini. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sanjaya, Umar Haris. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan* (Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014).
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV Mandar Maju, 2002).
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Dagang* (Jakarta: Intermasa, 1995).
- Sugiharto. *BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan, dan Strategi* (Jakarta: Gramedia, 2005).
- Sunarmi. *Hukum Kepailitan* (Jakarta: PT Sofmedia, 2010).
- Supramono, Gatot. *BUMN ditinjau dari Segi Hukum Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).
- Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1999).
- Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No.13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 2003, TLN No.4279.
- Indonesia. *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 Tahun 2003, LN No.70 Tahun 2003, TLN No.4297.
- Indonesia. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004, TLN No.4443.
- Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna "Merpati Nusantara" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*, PP No.70 Tahun 1971, LN No.91 Tahun 1971.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Rangka Pengalihan Bentuk PT. Merpati Nusantara Airlines menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*, PP No.10 Tahun 1997, LN No.25 Tahun 1997.

- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines*, PP No.77 Tahun 1999, LN No.160 Tahun 1999.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines*, PP No.29 Tahun 2002, LN No.54 Tahun 2002.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara*, PP No.41 Tahun 2003, LN No.82 Tahun 2003, TLN No.4305.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara*, PP No.45 Tahun 2005, LN No.117 Tahun 2005, TLN No.4556.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines*, PP No.59 Tahun 2005, LN No.141 Tahun 2005.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset*, PP No.10 Tahun 2004, LN No.23 Tahun 2004.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Persero di Bidang Pengelolaan Asset*, PP No.61 Tahun 2008, LN No.130 Tahun 2008.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Merpati Nusantara Airlines*, PP No.59 Tahun 2011, LN No.140 Tahun 2011.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines*, PP No.8 Tahun 2023, LN No.27 Tahun 2023.

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Afriana, Anita, dan Rai Mantili. 2017. "Implementasi Perdamaian (*Accord*) pada Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia." *De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 2 (2).

Ardinuri, Baitiya Muharrami, Reka Dewantara, dan Amelia Sri Kusuma Dewi. "Urgensi Pengaturan mengenai Kepailitan BUMN Persero." (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022)

Dewi, Ni Putu Agustini Ari, dan A.A. Ngr Yusadarmadi. 2013. "Peran Pengadilan Niaga sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan." *Kertha Semaya* 1 (5).

Diotama, Surya Inggrida. "Entitas Hukum BUMN yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik dalam Kepailitan." (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014).

Ghinarahmatina, Amalia. 2018. "Akibat Hukum Pemisahan Kekayaan Negara melalui Penyertaan Modal." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 2 (2).

Haryanto, Steven Galileo. "Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Mengalami Kepailitan." (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

Januar, Inri. 2016. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Memenuhi Prestasi dalam Hukum Jaminan." *To-ra*: 2 (1).

Khairunnisa. "Tinjauan Yuridis Permohonan Pailit PT Merpati Nusantara Airline sebagai BUMN Persero." (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

- Kuswardani, Danik Gatot, dan Achmad Busro. 2014. “Akibat Hukum Putusan Pailit terhadap Kreditor Preferen dalam Perjanjian Kreditor yang Dijaminkan dengan Hak Tanggungan.” *Law Reform* 9 (2).
- Larassatya. “Restrukturisasi Utang dengan Pola Konversi Utang menjadi Saham (*Debt to Equity Swap*): Studi Kasus PKPU PT Argo Pantes Tbk dan PT Sekar Laut Tbk.” (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).
- Noorwijnarko, Daniel Duardo. “Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Kepailitan BUMN Persero, Berdasarkan Three Keywords Theory.” (Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).
- Pangeran, Faritz Putra. “Tinjauan Yuridis Perbedaan Penafsiran Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atas Permohonan Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN (Studi Kasus PT. Merpati Nusantara Airlines).” (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018).
- Rahmadiyah, Rindy Ayu. 2015. “Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Notarius* 8 (2).
- Silitonga, Kevin Hans. “Badan Usaha Milik Negara sebagai Termohon Pailit: Studi Kasus Permohonan Pailit terhadap PT Merpati Nusantara Airlines.” (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019).
- Suhardo, Etty Susilowati. “Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” (Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008).
- Sularto. 2012. “Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan.” *Mimbar Hukum* 24 (2).

Putusan Pengadilan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 67/PUU-XI/2013.
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan No. 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan No. 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan No. 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Sby.

Dokumen Lembaga

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021).

Bagian Pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Parlementaria: Kilas Balik DPR 2014* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2014).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. *Laporan Kinerja 2015* (Jakarta: Kementerian BUMN RI, 2015).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. *Laporan Tahunan (Annual Report) 2016* (Jakarta: Kementerian BUMN RI, 2016).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. *Laporan Tahunan (Annual Report) 2021* (Jakarta: Kementerian BUMN RI, 2021).

Perusahaan Pengelola Aset. *Laporan Tahunan (Annual Report) 2021*. Jakarta: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Website

Akbar, Caesar. “Sri Mulyani Sebut 68 Persen BUMN Penerima Modal Negara Terancam Bangkrut.” <https://bisnis.tempo.co/read/1539954/sri-mulyani-sebut-68-persen-bumn-penerima-modal-negara-terancam-bangkrut>.

Diakses pada 26 September 2022.

Al-Hikam, Herdi Alif. “Lengkap! Ini Dia Daftar BUMN yang Dapat Suntikan Modal Negara Rp 73 T.” <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d->

[6162283/lengkap-ini-dia-daftar-bumn-yang-dapat-suntikan-modal-negara-rp-73-t](https://www.hukumonline.com/berita/a/6162283/lengkap-ini-dia-daftar-bumn-yang-dapat-suntikan-modal-negara-rp-73-t). Diakses pada 26 September 2022.

Aries, Albert. “Bisakah Seorang Kreditor Saja Menjadi Pemohon PKPU?”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-seorang-kreditor-saja-menjadi-pemohon-pkpu-lt589ac719e7249>. Diakses pada 23 Februari 2023.

Binekasri, Romys. “Merpati Airlines Bangkrut, Karyawan Dapat Pesangon Rp54 M.”
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230102164932-17-402160/merpati-airlines-bangkrut-karyawan-dapat-pesangon-rp-54-m>.
Diakses pada 25 Februari 2023.

CNN Indonesia. “Daftar BUMN yang Punya Utang Jumbo dan Menumpuk.”
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211216074242-92-734683/daftar-bumn-yang-punya-utang-jumbo-dan-menumpuk>. Diakses
pada 26 September 2022.

DetikFinance. “Utang Merpati Utang Merpati Menggunung Sampai Rp 7 T, Dua Pesawatnya Harus Ditarik.”
<https://finance.detik.com/industri/d-2450735/utang-merpati-menggunung-sampai-rp-7-t-dua-pesawatnya-harus-ditarik->. Diakses pada 1 Oktober 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. “Dahlan: Merpati Jangan Ditutup!”
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/4302/Dahlan-Merpati-Jangan-Ditutup.html. Diakses pada 1 Oktober 2022.

Heriani, Fitri Novia. “Ini Akibat Hukum Jika Perusahaan BUMN Pailit.”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-akibat-hukum-jika-perusahaan-bumn-pailit-lt617acbd738d73?page=all>. Diakses pada 30 September 2022.

Koran Tempo. “Kemenkeu Minta Jaminan Merpati Bisa Bangkit Kembali,”
<https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/347879/kemenkeu-minta-jaminan-merpati-bisa-bangkit-kembali>. Diakses pada 12 Maret 2023

Pitoko, Ridwan Aji. “Total Utang BUMN Tembus Rp1.573 Triliun.”
<https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/total-utang-bumn-tembus-rp1573-triliun>. Diakses pada 26 September 2022.

Rahayu, Teguh Budi. “Merpati Airlines Mau Ditutup, 1.233 Pesangon yang di PHK Belum Terbayar.” <https://economicreview.id/merpati-airlines-mau-ditutup-1-233-pesangon-yang-di-phk-belum-terbayar/>. Diakses pada 21 Februari 2023.

Rosana, Fransisca Christy Rosana. “Pesangon Belum Dibayar, Karyawan Merpati Mengadu ke Erick Thorir.” <https://bisnis.tempo.co/read/1355757/pesangon-belum-dibayar-karyawan-merpati-mengadu-ke-erick-thohir>. Diakses pada 27 Februari 2023.

SP, Ikhlas Permana. “Merpati Airlines Dinyatakan Pailit Setelah 8 Tahun Tak Beroperasi, Pengamat: Terlalu Banyak Pertimbangan Politis.” <https://www.inews.id/finance/bisnis/merpati-airlines-dinyatakan-pailit-setelah-8-tahun-tak-beroperasi-pengamat-terlalu-banyak-pertimbangan-politis>. Diakses pada 20 Februari 2023.

Wareza, Monica. “Merpati Sudah Lama Mati Suri, Tapi Belum Bisa Dibubarkan.” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210504195402-17-243189/merpati-sudah-lama-mati-suri-tapi-belum-bisa-dibubarkan>. Diakses pada 3 Maret 2023